DEVELOPING OF BEACH-BASED ECOTOURISM AREA IN THE SUB-DISTRICT OF KELUMBAYAN, TANGGAMUS REGENCY

Nur Efendi

Jurusan Administrasi Bisnis, Universitas Lampung, Indonesia E-mail: nur.efendi@fisip.unila.ac.id

ABSTRACT

The purposes of this research are to identify the potentials of beach tourism, to identify institutional barriers, and to create a model for the development of a beach-based ecotourism area in the Sub-District of Kelumbayan, Tanggamus Regency. The type of this research is exploratory descriptive. This study uses an inductive approach with qualitative analysis methods. The main data sources are the interview results, observations, and other relevant documents. Data validity testing was done by triangulation of the sources. The results of research show that there are at least 7 beach tourism objects in the Sub-District of Kelumbayan that are potential to be developed. The management of tourist attractions are carried out by each government at the village level through the tourism awareness group. The tourism areas development has not involved any external stakeholders outside the village yet, such as universities and private sectors. The absence of regulations on the management of ecotourism areas, the lack of budget allocation, the absence of a uniform fee system related to entrance tickets and profit sharing between the village and the manager, and the opportunistic behavior of a small part of the community are institutional obstacles in the development of the Kelumbayan ecotourism area. Based on the study, the researchers propose that the development of its coastal ecotourism area is sustainable tourism with the penta helix model, which involves local governments, private sectors, academias, local communities, and mass media.

Keywords: beach, ecotourism, penta helix

PENGEMBANGAN KAWASAN EKOWISATA BERBASIS PANTAI DI KECAMATAN KELUMBAYAN, KABUPATEN TANGGAMUS

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi wisata pantai, mengidentifikasi hambatan kelembagaan, dan membuat sebuah model pengembangan kawasan ekowisata berbasis pantai di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus. Tipe penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dengan metode analisis kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan. Pengujian validitas data dilakukan dengan cara triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat setidaknya 7 objek wisata pantai di Kecamatan Kelumbayan yang potensial untuk dikembangkan. Pengelolaan kawasan wisata dilakukan oleh masing-masing pemerintah desa melalui Kelompok Sadar Wisata. Pengembangan kawasan wisata belum melibatkan stakeholder di luar desa, seperti perguruan tinggi dan pihak swasta. Belum adanya regulasi tentang pengelolaan kawasan ekowisata, minimnya alokasi anggaran, tidak adanya sistem biaya yang seragam terkait dengan tiket masuk dan bagi hasil antara desa dengan pengelola, perilaku oportunis sebagian kecil masyarakat merupakan hambatan kelembagaan dalam pengembagan kawasan ekowisata Kelumbayan. Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini maka pengembangan kawasan ekowisata pantai yang diusulkan adalah pariwisata berkelanjutan dengan model penta helix, yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, masyarakat setempat, dan media massa.

Kata kunci : ekowisata, pantai, penta helix

PENDAHULUAN

Kabupaten Tanggamus adalah salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah dalam bentuk objek wisata yang indah dan alami. Berdasarkan catatan BPS Kabupaten Tanggamus tahun 2019, di Kabupaten Tanggamus terdapat setidaknya 80 objek wisata yang tersebar di berbagai kecamatan, dan sebagian besar di antaranya adalah wisata Bahari. Keberadaan objek-objek wisata ini seharusnya memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanggamus. Namun berdasarkan data statistik, diketahui bahwa PAD Kabupaten Tanggamus pada tahun 2018 lalu baru mencapai Rp 61,7 milyar atau 4,02% dari realisasi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp 1,53 triliun (Kabupaten Tanggamus Dalam Angka 2019). Meskipun data statistik tidak menyebutkan besarnya kontribusi parawisata dalam PAD Tanggamus, namun satu indikator yang menunjukkan belum berkembangnya sektor parawisata adalah jumlah hotel dan akomodasi yang sangat sedikit, yaitu 8 hotel dengan jumlah kamar 161 unit dan 211 tempat tidur (Kabupaten Tanggamus Dalam Angka 2019).

Kurang berkembangnya sektor parawisata di Kabupaten Tanggamus salah satunya disebabkan oleh kondisi infrastruktur ke objek wisata yang kurang mendukung. Dari 1.339,7 km jalan kabupaten, lebih dari setengahnya adalah jalan kerikil dan jalan tanah. Terdapat 207,29 km jalan kabupaten yang kondisinya rusak, dan bahkan 477,78 km dalam kondisi rusak berat (Kabupaten Tanggamus Dalam Angka 2019). Hal ini tentunya sangat menghambat bagi wisatawan yang ingin objek wisata di Kabupaten mengunjungi Tanggamus.

Fenomena kurang berkembangnya sektor pariwisata Kecamatan Kelumbayan, disebabkan oleh empat aspek, yaitu 1) lemahnya Pemerintah Daerah manajemen dalam menangani objek-objek wisata, 2) kondisi infrasuktur yang tidak mendukung perkembangan objek wisata, dan 3) kurangnya pemahaman masyarakat tentang kepariwisataan, adanya hambatan kelembagaan 4) pariwisata. Lemahnya manajemen Pemerintah Daerah dalam menangani objek-objek wisata

dapat dilihat dari kondisi sebagian besar objek wisata yang terlihat terabaikan dan tumbuh tanpa arah. Belum terlihat adanya koordinasi antar SKPD dalam mengembangkan suatu objek sehingga tanggungjawab dibebankan sepenuhnya pada Dinas Parawisata. Hal ini semakin diperparah oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang masih miskin dan tertinggal, sehingga partisipasi masyarakat terkesan tanpa kendali dan cenderung jauh dari slogan-slogan pengembangan wisata, seperti "senyum, ramah, dan bersahabat".

Bisnis parawisata adalah bisnis yang intangible. Bisnis ini menjual produk tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan oleh pengunjung. Sebagai salah satu bisnis yang bergerak dibidang jasa, pengembangan kawasan wisata tidak hanya fokus pada objek wisata sebagai sebuah produk, tetapi juga meliputi Price, Promotion, Place, Physical Evidance, People, dan Process. Pengembangan objek wisata tanpa menyentuh semua aspek yang terkait dengan kawasan wisata tidak akan mencapai hasil yang optimal. Wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi tidak hanya ingin melihat, tetapi ingin menikmatinya. Oleh karena itu, suatu kawasan wisata harus diciptakan dan fokus pada kepuasan Sambutan yang ramah dari pengunjung. pengelola dan masyarakat, souvenir yang indah dan unik, layanan yang menyenangkan, serta fasilitas yang aman dan nyaman, menjadi tolok ukur bagi pengunjung untuk mendatangi sebuah destinasi.

Wisata bahari adalah objek wisata berbasis pantai. Objek wisata bahari meliputi semua aktifitas wisata yang dilakukan di daerah dan perairan, seperti menyelam, berenang, selancar, kuliner, dan lain-lainnya. Dalam konteks ini, Kecamatan Kelumbayan sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan tujuan wisata bahari. Kecamatan Kelumbayan sangat diuntungkan oleh letak georgrafisnya. Tujuh dari delapan Desa yang terdapat di Kelumbayan berada di pinggir pantai, yaitu Desa Paku, Napal, Negeri Kelumbayan, Penyandingan, Umbar, Susuk, dan Kiluan Di Desa Kiluan Negeri terdapat Negeri, kawasan wisata Teluk Kiluan yang sudah oleh Pemerintah Kabupaten ditetapkan Tanggamus dan Propinsi Lampung sebagai kawasan ekowisata bahari. Di Kiluan Negeri,

wisatawan dapat menyaksikan dari dekat atraksi lumba-lumba di sekitar Teluk Kiluan. Tidak terlalu jauh dari Teluk Kiluan, terdapat wisata pantai Gigi Hiu di Desa Negeri Kelumbayan. Selain Teluk Kiluan dan Gigi Hiu masih terdapat beberapa kawasan pantai yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata andalan di Kecamatan Kelumbayan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah Model Pengembangan Berbasis Pantai Kawasan Ekowisata Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tangamus? Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah model pengembangan kawasan ekowisata berbasis pantai Kecamatan Kelumbayan. Untuk mencapai tujuan ini maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan, yaitu (1) Mengidentifikasi potensi kawasan wisata pantai yang ada di Kecamatan Kelumbayan, (2) Mengidentifikasi berbagai hambatan kelembagaan dalam industri pariwisata di Kecamatan Kelumbayan, (3) Membuat sebuah model pengembangan berbasis kawasan ekowisata pantai Kecamatan Kelumbayan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut The World **Tourism** Organization pariwisata secara umum dipersepsikan sebagai "being limited to holiday activity only", as people "traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes". Tempat dan lokasi yang dikunjungi dalam suatu kegiatan wisata disebut destinasi wisata atau objek wisata. Destinasi wisata bisa negara ataupun lokasi-lokasi tertentu yang menjadi tujuan wisatawan. Daya tarik dari suatu destinasi wisata adalah adanya produk wisata. Dalam hal ini Stange, dkk (2011:6) mengatakan bahwa ada 6 (enam) produk wisata, vaitu attraction, Access, Activity, Services, Qualified Personnel, dan Promotion.

Dikatakan oleh Stange, dkk (2011:6) "All tourism products begin with an attraction, without which no further discussion is needed. An attraction must have access or else no further discussion is needed. Do note, however, that

most often access refers to visitor capacity to arrive. Sometimes access means the opposite. Sometimes an attraction is attractive because it is difficult to get to, such as wilderness areas and for adventure activities. Either way, access is essential to the exploitation of the attraction. Every visitor experiences an attraction, but how they experience depends on the activity they select (see "Experience" below). A person can experience Mount Everest vicariously through the Internet or from the porch of a cushy mountain lodge. They could also experience it by scaling the mountain to its death-defying icy peak. Thus it is erroneous to say that Mount Everest offers a particular kind of experience; it may be short-hand for mountaineering, but experience depends on the activity. To realize an activity requires services. Services are all those functions that a visitor might or might not be able to do for him or herself but in all cases chooses someone else to do it for them. Services include actually allowing the activity to take place (such as access granted by a national park), the security of park guards and wilderness responders, the food, the housing, transportation, the communication, the provision of souvenirs, etc. If an activity requires no services (such as using the backyard of one's own home), then we are not talking about a tourism product. Service provision, in turn, requires that someone qualified provide that service, whether a guide, chef, driver, transportation company, national park staff, police, or street juggler. Even if that someone is an automated robot, it still requires someone (and someone also to service the robot, of course). Despite the best of tourism product designs, if no one knows the product exists, then all is for naught. A tourism product must also include promotions, even if that is "only" wordof mouth."

Untuk mengembangkan suatu kawasan wisata dibutuhkan visi. Visi pengembangan kawasan wisata ini akan terrcapai ketika semua stakeholder memiliki kesamaan visi, berpartisipasi dan bersinergi dalam memobilisasi sumberdaya. Seperti dikatakan oleh Rodriguez-Diaz & Espino-Rodriguez (2007), daerah wisata harus mengembangkan operasinya sesuai dengan sumberdaya lokal.

Hal ini sesuai dengan prinsip pariwisata berkelanjutan dalam mengembangkan kawasan wisata yang mengutamakan pemanfaatan sumberdaya lokal (Štumpf, 2014 : 219).

Pada konteks kelembagaan, kegagalan dalam mengembangkan kawasan ekowisata di Kecamatan Kelumbayan juga disebabkan oleh banyaknya hambatan kelembagaan yang harus dihadapi oleh pelaku dalam industri pariwisata. Kelembagaan atau Institutions adalah aturan main yang secara sengaja diciptakan manusia menciptakan ketertiban untuk dalam masyarakat. Kelembagaan adalah seperangkat aturan yang menata perilaku hubungan antara individu atau kelompok (Borner, dkk, 1992: 13). Kelembagaan ini terdiri dari aturan formal dan aturan informal serta karakteristik penegakannya (North, 1990: 3). Secara konseptual North (1991 : 97) mendefinisikan kelembagaan sebagai "the humanly devised constraints that structure political, economic and social interaction. They consist of both informal constraints (sanctions, taboos, customs. traditions, and codes of conduct), and formal rules (constitutions, laws, property rights). Namun yang lebih penting lagi dalam konteks kelembagaan ini adalah the way the game is played. Kelembagaan juga berbeda dengan organisasi. Sebagaimana dikatakan oleh Ollila (2009: 19), Kelembagaan sebagai rules, rules of game of right, organization is much more difficult. Organizations have features such as common goals, borders between members and non-members, perhaps common management and organizational culture.

Meskipun kelembagaan diciptakan untuk menjaga ketertiban, namun kelembagaan tidak selamanya berjalan dengan dengan mulus dan menciptakan pertumbuhan (Verriest, dkk, 2008 : 5) tetapi juga bisa menurunkan ketidakpastian (North, 1993: 2). Ada banyak aspek yang menghambat pencapaian tujuan dari suatu kelembagaan, yaitu apa yang disebut dengan rintangan kelembagaan atau institutional barriers (Chang & Wu, 2013: 6). Rintangan kelembagaan adalah hambatan dalam lingkungan kelembagaan yang mencegah mekanisme seleksi pasar berfungsi dengan baik (Chang & Wu, 2013 : 6). Chang dan Wu menggunakan istilah rintangan kelembagaan dalam arti "rintangan untuk bertahan hidup,"

yang oleh Geroski (1995: 424) disebut sebagai "tingkat kelangsungan hidup pendatang yang paling rendah". Rintangan kelembagaan terjadi karena kerentanan institusional (institusional susceptibility) atau hambatan kelembagaan (institutional obstacles), seperti peraturan persyaratan yang berlebihan dan permintaan suap (Chang & Wu. 2013: 6). Beberapa peneliti menggunakan istilah institutional obstacles atau hambatan kelembagaan. (Borner, dkk: 1992; Brunetti, dkk: 1997; Tybout: 2000; Fogel, dkk: 2006) dan ketidakpastian kelembagaan (institutional uncertainty) (Borner, dkk: 1992) untuk padanan istilah rintangan kelembagaan.

Pada konteks hubungan antara pelaku bisnis dan birokrasi. Luo dan Junkunc (2008: 134) menyatakan ada beberapa bentuk rintangan administratif yang menjadi hambatan dalam vaitu Persyaratan kelembagaan, 1) dokumentasi yang berlebihan, 2) Informasi tentang aturan dan regulasi yang tidak memadai, 3) Prosedur yang tidak konsisten pada departemen yang berbeda, 4) Periode pendaftaran atau ratifikasi panjang, 6) Hambatan dalam regulasi yang dibuat, 7) Formalitas yang berlebihan, 8) Tidak adanya sistem biaya, pajak, dan biaya lainnya yang seragam, 9) Adanya proses yang rumit dan memerlukan persetujuan berbagai lembaga, dan 10) Sikap yang tidak mendukung dari lembaga publik pemerintah.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Pada tahap awal penelitian ini akan diidentifikasi potensi kawasan wisata pantai yang terdapat di Kecamatan Kelumbayan. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi hambatankelembagaan dalam hambatan industri pariwisata di Kecamatan Kelumbayan. Hasil identifikasi potensi dan hambatan kelembagaan ini menjadi input dalam menyusun strategi dan pengembangan kawasan ekowisata berbasisi pantai di Kecamatan Kelumbayan. bisa menghasilkan Untuk model diinginkan maka pendekatan yang digunakan pendekatan induktif dengan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah (1) Kepala Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus (2) Camat Kelumbayan, (3) Kepala Desa lokasi wisata pantai, masyarakat di kawasan wisata

pantai, dan wisatawan pantai di Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Jenis data yang diperoleh melalui penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi. sekunder diperoleh dari kantor dinas terkait di Kabupaten Tanggamus, dan BPS. Pengujian validitas data dilakukan dengan cara triangulasi. Sedangkan pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara memeriksa transkrip untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan yang sepanjang proses penyusunan dilakukan transkrip tersebut dan memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam memberikan kode dan mengartikan kode. Proses pengolahan data meliputi a) mempersiapkan data untuk dianalisis, b) membaca data, c) menganalisis lebih detail dengan meng-coding data, d) menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategorikategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Data kemudian dianalisis melalui tahapan, yaitu reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN Potensi Wisata Pantai Di Kecamatan Kelumbayan

1. Teluk Kiluan

Wisata alam Teluk Kiluan terletak di Pekon Kiluan Negeri. Destinasi Wisata Teluk Kiluan sangat cocok bagi wisatawan yang gemar berpetualang karena topografinya yang berbukit sangat menarik menarik untuk dijelajahi.

Wisata Teluk Kiluan menawarkan pantai indah dan atraksi lumba-lumba. yang Pengunjung yang datang ke Kiluan dapat menyaksikan atraksi lumba-lumba secara langsung di laut lepas dengan cara naik perahu. Dibutuhkan waktu 30 menit sampai 1 jam bagi pengunjung untuk bisa menyaksikan atraksi lumba-lumba yang dapat disaksikan pada pagi hari dan sore hari. Wisatawan dapat menyaksikan dari dekat atraksi Lumba-Lumba dengan menyewa Perahu Katir. Selain itu, wisatawan juga bisa menyaksikan Penyu Hijau (Chelonia Mydas) dan Penvu (Eretmochelys imbricate), yang di waktu-waktu tertentu menepi ke Pantai. Sore hari, pengunjung

bisa melihat primata berbulu hitam dan bersuara nyaring saling bersahutan. Siamang (symphalangus syndactylus) dan Simpai (Presbythis Melalops) serta Kukang (Nycticebus Coucang) adalah jenis primata yang banyak terdapat di Kelumbayan. Kicauan burung pun terdengar hampir di setiap pagi dan sore yang mampu menyejukkan pikiran.

Gambar 1. Pantai Teluk Kiluan



2. Pantai Gigi Hiu

Pantai Gigi Hiu atau disebut juga Pantai Batu Layar terkenal dengan batu-batunya yang tajam, runcing dan besar. Salah satu bentuk batunya sangatlah lebar dan besar menyerupai layar sebuah perahu layar. Akses menuju tempat ini cukup sulit dan sangat menantang. Dengan mengendarai sepeda motor, Pantai Gigi Hiu dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit dari Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan. Gugusan batu - batu karang Gigi Hiu luar biasa indahnya sehingga sering dijadikan objek pemotretan para fotografer.

Gambar 2. Pantai Gigi Hiu di Desa Susuk



3. Laguna Gayau

Laguna Gayau adalah sebuah Laguna yang terletak di balik bukit Kiluan dan terletak berdekatan dengan pantai Gayau yang indah. Pada hakekatnya air asin laguna adalah salah satu masa air yang dipisahkan dari laut oleh pasir penghalang atau oleh jalan masuk sempit yang permanen atau semi-permanen, atau hamparan air yang terkurung oleh lingkaran, atau karang berbentuk ladam (tapal kuda) yang mempunyai satu atau lebih kaloran di dalamnya, atau perairan dangkal yang terdapat di antara karang

penghalang dan pulau yang mengelilinginya (Sukardjo, 1985 : 128). Kedalaman Laguna Gayau diperkirakan berkisar antara 1 sampai 3 meter dan aman untuk berenang ataupun untuk sekedar berendam. Air di dalam laguna sangat jernih berwarna biru kehijauan. Di sisi Laguna ada kolam yang lebih kecil dan nampak seperti akuarium alami. Ada satu spot yang menarik di Laguna Gayau ini, yaitu sebuah lubang batu karang yang terletak di sela-sela gugusan batu karang. Uniknya, lubang batu karang tersebut selalu menyemburkan air dengan percikan yang cukup banyak ketika ombak di lautan sedang berdebur kencang.

Gambar 3. Laguna Gayau, Kiluan Negeri



4. Pantai Napal

Berbeda dengan pantai Teluk Kiluan yang berpasir putih, Pantai Napal tidak berpasir putih dan bentuknya tidak begitu landai namun bersih. Ombak Pantai Napal cukup besar dan pantainya tidak bisa dipakai untuk mandi karena banyaknya batu karang. Disini pengunjung juga dapat menemukan laguna yang merupakan kolam kecil dibalik barisan batu karang. Bagi wisatawan yang menyukai tantangan dan perjalanan, Pantai Napal bisa menjadi pilihan untuk berlibur.

Gambar 4. Pantai Napal



5. Pantai Batu Suluh

Pantai Batu Suluh berada di Pekon Negeri Kelumbayan. Pantai batu suluh ini masih natural dan ombaknyapun cukup menantang. Masyarakat sekitar ada juga yang menyebutnya Pulau Bun-Bun yaitu sebuah pantai yang suara ombaknya besar menggelegar. Pantai ini dinamakan Batu Suluh karena adanya batu karang yang memiliki warna merah. Dari pantai ini terlihat gunung Tanggang dan Desa Pematang Serunting yang merupakan tempat berawalnya kisah Si Pahit Lidah. Selain itu juga terdapat wisata Gua Gongwani yang masih berada di kawasan pantai Batu Suluh.

Gambar 5. Pantai Batu Suluh dengan latar Gunung Tanggang dan Pematang Serunting



6. Pantai Harapan

Pantai Harapan yang berada di Desa Penyandingan memiliki suasana alam yang unik. Selain pantainya yang cukup luas, pengunjung juga dapat menikmati keindahan air laut yang jernih, serta hamparan pepohonan yang rimbun dan hijau di sekitar pantai. Pantai Harapan memiliki struktur pantai yang landai dan tidak berombak besar sehingga pengunjung bisa berenang hingga 100 dari bibir pantai.. Suasana pantai yang tenang membuat pantai ini relatif aman untuk menikmati permainan di pinggir laut. Dari Pantai Harapan pengunjung juga dapat menyeberang ke Pulau Kelapa ataupun menyaksikan atraksi lumba-lumba dengan jarak tempuh yang lebih dekat dibandingkan dari Teluk Kiluan.

Gambar 6. Sunset di Pantai Harapan



7. Pantai Teluk Paku

Teluk Paku adalah teluk yang ada di Desa Paku dengan pantai yang masih alami. Di Pantai Teluk Paku selain terdapat Batu Naga ada juga Batu Nyekhbu. Batu Naga yang konon kepalanya ada di Pulau Kelapa dan mitosnya berkaitan dengan Si Pahit Lidah. Sedangkan di atas bukit Batu Nyekhbu terdapat genangan air yang cukup dalam yang dinamakan "Kulam Tampak".

Gambar 7. Suasana Tenang di Teluk Paku



Hambatan Kelembagaan Dalam Industri Pariwisata di Kelumbayan

Tata kelola kelembagaan pariwisata di Kelumbayan dilakukan pemerintah Kabupaten menerbitkan Peraturan dengan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Tentang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011–2031. Pada pasal 32 ayat 2 secara tegas dikatakan bahwa Kecamatan Kelumbayan adalah Kawasan peruntukan wisata alam pantai selain Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Cukuh Balak, Limau dan Pematang Sawa.

Berdasarkan hasil penelitian, sejauh ini belum banyak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk menindaklanjuti Perda ini. Dinas Pariwisata sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) juga belum memiliki untuk mengembangkan strategis kawasan ekowisata yang ada di Kelumbayan. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanggamus belum bisa dilakukan secara serentak untuk semua destinasi karena adanya keterbatasan anggaran. karena itu Pemerintah Daerah menggunakan skala prioritas, dan salah satu prioritas untuk pengembangan wisata adalah Kawasan Ekowisata Teluk Kiluan. "Pengembangan kawasan Kiluan membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh sebab itu, kawasan ekowisata lain harus menunggu untuk bisa dilirik oleh Pernyataan Daerah." Pemerintah Kepala Bappelitbangda ini semakin memperkuat asumsi awal bahwa belum berkembangnya pariwisata di Kabupaten Tanggamus salah satunya disebabkan oleh lemahnya manajemen Pemerintah Daerah dalam menangani objekobjek wisata. Pemerintah Daerah Tanggamus belum menggali sumber-sumber pendanaan dari pihak eksternal dan hanya mengandalkan

anggaran daerah untuk pengembangan kawasan wisata yang ada daerahnya.

Pengembangan kawasan ekowisata Kelumbayan tidak harus menunggu anggaran jika Pemerintah Daerah membuka komunikasi dengan stakeholder yang terkait dengan bisnis pariwisata. Peluang untuk mengembangkan kawasan ekowisata dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan perguruan Tinggi dan pihak swasta. Namun hal ini belum terealisasi dan belum melembaga. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh dosen Perguruan Tinggi yang ada di Propinsi Lampung di beberapa kawasan ekowisata khususnya Kelumbayan, juga masih bersifat parsial dan dalam skala yang kecil.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengelolaan kawasan wisata pantai yang ada di Kabupaten Tanggamus dilakukan oleh masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dibentuk oleh masing-masing Desa. Melalui kelompok ini, Pemerintah Desa kawasan mengelola wisata dengan menggunakan manajemen wisata yang sangat sederhana. Mereka menugaskan masyarakat untuk menjaga pintu masuk dan menarik tiket, memberi izin untuk berdagang, dan mengelola dana dari kawasan wisata untuk keperluan Pokdarwis dan Desa. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Tanggamus bahwa "sebagian besar pengelolaan kasawan wisata dilakukan oleh masyarakat setempat. sebab itu, Pemerintah belum menargetkan pendapatan dari berbagai objek wisata tersebut."

kelola kelembagaan industri Tata pariwisata lebih menekankan pada penciptaan aturan main dalam industri. Artinya, Pemerintah sebagai relulator membuat aturan yang secara luas diikuti dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata. Dalam konteks pengembangan kawasan ekowisata Kelumbayan, sudah seharusnya pemerintah daerah membuat kebijakan yang mengatur pengelolaan kawasan wisata sehingga tidak terjadi asymentric information. Pengelolaan kawasan wisata oleh Desa melalui Pokdarwis pada saat ini belum ada masalah. Namun seiring dengan perkembangan wilayah, peningkatan kuniungan wisatawan. dan peningkatan kebutuhan masyarakat, hal ini akan berpotensi untuk terjadinya saling klaim dalam masyarakat,

baik antara pemerintah Desa dengan masyarakat, antara Pokdarwis dengan masyarakat, atau bahkan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Oleh sebab itu sudah waktunya bagi Pemerintah Dearah Kabupaten Tanggamus untuk membuat Peraturan Daerah sehingga pengelolaan kawasan wisata menjadi lebih baik dan profesional. Sampai sejauh ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada aturan yang secara tegas mengatur pengelolaan kawasan pantai sebagai objek wisata kecuali aturan yang dibuat oleh Desa.

Mengacu pada pendapat Luo dan Junkunc (2008: 134) tentang hambatan kelembagaan, terdapat beberapa hambatan pengembangan kawasan ekowisata di Kelumbayan yaitu:

- Belum adanya aturan dan regulasi yang mengatur pengelolaan kawasan ekowisata di Kelumbayan.
- 2. Kebijakan Pemda yang terlalu memprioritaskan kawasan ekowisata Teluk Kiluan dan meninggalkan kawasan ekowisata yang lain.
- Tidak adanya sistem biaya yang seragam terkait dengan tiket masuk, dan bagi hasil antara Desa dengan pengelola kawasan ekowisata.
- 4. Sikap dan perilaku sebagian kecil anggota masyarakat yang oportunis dengan memanfaatkan kehadiran pengunjung di lokasi wisata sebagai objek pemerasan dengan alasan biaya parkir, biaya keamanan, dan biaya-biaya lainnya.

Hambatan dalam pengembangan kawasan ekowisata Kelumbayan memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Tapatfeto,dkk tentang pengembangan Objek Wisata Pantai Oetune (2018 : 7). Dalam penelitiannya Tapatfeto mengemukakan beberapa hambatan, yaitu 1) Kurangnya peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata; Kurangnya 2) pembangunan pemerintah kabupaten terhadap sektor pariwisata; 3) Kurangnya kuantitas dan spesialisasi sumber daya manusia pada Dinas terkait; 4) Kurangnya kerja sama dengan investor; 5) Belum terdapat sistem promosi yang menarik; 6) Keterbatasan sarana dan prasarana kerja pada dinas terkait dan objek wisata; dan 7) Keterbatasan dan kurangnya perawatan fasilitas penunjang objek wisata.

Model Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Pantai

Berdasarkan hasil penelitian, setidaknya ada 5 (lima) pihak yang telah terlibat secara pengembangan langsung dalam kawasan ekowisata berbasis Pantai di Kelumbayan, yaitu Pemerintah Kabupaten dan jajarannya sampai ke Desa, Masyarakat Desa, Perguruan Tinggi, Media Sosial para pengunjung, dan Swasta yang dalam hal ini adalah biro perjalanan. Meskipun masih belum optimal namun masing-masing pihak telah menjalankan aktivitas di lokasi wisata di Kecamatan Kelumbayan. Fenomena yang selama ini terjadi adalah masing-masing pihak bekerja sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi. Pemerintah Kabupaten Tanggamus meskipun telah memiliki program prioritas pengembangan kawasan wisata namun belum mampu menjalankan program tersebut secara optimal karena keterbatasan dana. Sejauh ini Pemerintah Daerah sudah berupaya untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kelumbayan khususnya Teluk Kiluan namun belum menunjukkan hasil yang signifikan. Sekali lagi, keterbatasan anggaran menjadi kendala bagi Pemerintah untuk mengembangan destinasi wisata di Kelumbayan.

Kegiatan yang dilakukan Perguruan Tinggi juga masih belum terkait dengan visi pengembangan kawasan ekowisata Beberapa dosen Universitas Kelumbayan. Lampung pernah melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan dan mendampingan di kawasan Teluk Kiluan dan Pantai Harapan melalui skema Pengabdian Kepada Masyarakat. Selain oleh Universitas Lampung juga melakukan kegiatan pendampingan kepada masyarakat di lokasi kawasan ekowisata melalui progran Kuliah Kerja Nyata. Tidak kurang dari 100 orang mahasiswa diturunkan setiap tahun sejak tahun 2015 di Kecamatan Kelumbayan dengan membawa program pemberdayaan sosial ekonomi dan guna mendukung pengembangan kawasan ekowisata Pemerintah Daerah. Meskipun kegiatan ini telah menghabiskan dana yang cukup besar, namun dampaknya pada perubahan perilaku masyarakat, pertumbuhan ekonomi kawasan, dan pengembangan wisata belum signifikan. Masyarakat masih belum mampu menghasilkan produk unggulan yang dapat dijadikan oleh-oleh

bagi pengunjung. Hal ini selain disebabkan karena sikap mental dan rendahnya partisipasi masyarakat juga disebabkan oleh masih minimnya gerakan pemerintah dalam memberikan pendampingan dan pelatihan untuk masyarakat dalam menghasilkan produk atau olahan khas (Devy & Soemanto, 2017: 40).

Pihak swasta yang telah terlibat dalam kawasan ekowisata pengembangan Kelumbayan adalah biro perjalanan. Seiak tahun 2010 sudah ada beberapa biro perjalanan di Bandar Lampung yang menawarkan paket wisata ke Teluk Kiluan dan sekitarnya. Namun sejak tahun 2018 kunjungan ke Teluk Kiluan semakin menurun yang disebabkan oleh bencana alam yang menimpa Kelumbayan beberapa tahun terakhir, seperti banjir rop, banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Akibat dari alam ini, bencana kondisi infrastuktur jalan yang sebelumnya masih bisa dilewati oleh kendaraan roda empat menjadi rusak berat dan berbahaya untuk dilewati.

Salah satu dampak positif dari pengembangan kawasan wisata adalah dampak sosial budaya berupa terbentuknya berbagai organisasi dalam bidang pariwisata seperti Pokdarwis (Devy & Soemanto, 2017: 40). Masyarakat melalui Pokdarwis berupaya mengembangkan kawasan ekowisata menurut visi mereka sendiri. Beberapa aktiviatas yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya adalah:

- 1. Menyiapkan tiket masuk.
- 2. Membersihkan lokasi wisata.
- 3. Mengelola perparkiran, dan
- 4. Membuat papan penunjuk arah.

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata sangat penting. Tanpa keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat lokal secara langsung dalam kegiatan pengembangan pariwisata pada suatu daerah yang didalamnya terdapat sumber daya potensial untuk dikembangkan, dirasa akan cukup sulit bagi obyek wisata tersebut untuk berkembang (Devy & Soemanto, 2017: 38)

Dalam kasus yang terjadi di Kelumbayan, upaya positif Pokdarwis ternyata belum didukung oleh perilaku sebagian kecil masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungannya. Sampah yang berserakan di sepanjang jalan menuju lokasi dan kondisi rumah yang kumuh membuat minat wisatawan untuk kembali berkunjung menjadi hilang. Dalam konteks marketing, hal ini dijelaskan dengan istilah tidak terjadinya "repeatation" yang mengakibatkan kawasan wisata "not recommended". Untuk kasus Kelumbayan, ada beberapa indikator yang menyebabkan kawasan wisata ini tidak recommended, yaitu:

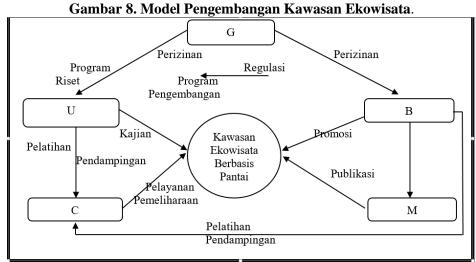
- Produk wisata yang sajikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, hanya mengandalkan wisata alam.
- 2. Biaya yang harus dikeluarkan besar dan tidak pasti.
- 3. Sebagian masyarakatnya tidak *welcome* terhadap pendatang.
- Lokasi yang sulit dijangkau dan berbahaya. Meskipun ada beberapa hambatan dalam pengelolaan kawasan ekowisata Kelumbayan, namun publik yang belum sempat berkunjung terlanjur percaya dengan berbagai publikasi di media sosial seperti facebook, instagram, maupun personal blog yang diunggah oleh beberapa wisatawan yang pernah berkunjung ke Kelumbayan. Mereka biasanya menampilkan foto-foto atau video tentang keindahan alam Kelumbayan. Hal ini tentunya menjadi promosi gratis bagi pengembangan kawasan ekowisata Artinya, media yang banyak Kelumbayan. pengembangan kawasan berperan dalam ekowisata adalah media sosial dengan berbagai kesan positif (positive Word of Mouth) yang mampu membangkitkan rasa penasaran mereka yang belum berkunjung.

Melihat pola pengembangan kawasan ekowisata Kelaumbayan yang tidak terarah ini, akan lebih baik jika Pemerintah Daearah Tanggamus mulai mengembangkan kawasan ekowisata yang mengemban misi sustainablity tourism yang ditandai oleh 4 (empat) karakteristik, yaitu 1) Enhancing the well-being of communities, 2) Supporting the protection of the natural and cultural environment, 3) product quality and tourist Recognizing satisfaction, dan 4) **Applying** adaptive management and monitoring (Unesco, tt. 9). Dalam konsep sustainablity tourism secara tegas dikatakan bahwa aktivitas pengembangan pariwisata hendaknya mendukung memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang berada di lokasi wisata

akan menjadi lebih baik. Tidak kalah pentingnya adalah perlunya keterlibatan stakeholder lokal dalam merencanakan pengambangan kawasan wisata (Unesco, tt. 15). Hal ini sudah mulai dilakukan oleh Universitas Lampung dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tujuannya adalah penguatan ketahanan ekonomi masyarakat.

Berangkat dari pemikiran ini maka sudah waktunya bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk menggandeng Perguruan Tinggi, masyarakat Bisnis, dan masyarakat di lokasi wisata untuk secara bersama-sama memajukan kawasan wisata yang ada di Kelumbayan. Tidak adanya dana sebagaimana diungkapkan oleh Pemerintah Kabupaten adalah kegiatan pembangunan dari akibat dilakukan sendiri dan tidak menggandeng pihak berkepentingan lain yang juga pengembangan kawasan wisata. Oleh sebab itu semua pihak harus terlibat, saling bekerja sama dan bersinergi sehingga terjadi percepatan dalam pengembangan kawasan ekowisata Kelumbayan. Bukan hanya Triple Helix seperti yang selama ini didengungkan, tetapi Penta Helix yang merupakan kolaborasi dari 5 (lima) komponen, yaitu (Goverment/G), Masyarakat Desa itu sendiri (Community/C), Perguruan Tinggi (University/U), Swasta (Business/B), dan Media Internet (Intermet Media/M). Masyarakat harus terlibat secara aktif dan bukan lagi sebagai objek akan tetapi sebagai mitra. Setiap pihak harus bertanggungjawab untuk memajukan kawasan wisata dan berbagi tanggungjawab dalam menangani produk wisata.

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam membuat kebijakan dan aturan main, memberikan visi pengembangan kawasan wisata, melakukan program-program pemberdayaan, mempermudah izin bagi kegiatan pengembangan kawasan wisata, dan mempersiapkan infrastruktur menuju kawasan wisata. Perguruan tinggi bertanggungjawab untuk melakukan pemberdayaan pendampingan kepada masyarakat, melakukan kaijian-kajian menyangkut budaya dan kearifan Swasta bertanggungjawab untuk lokal. mempromosikan objek wisata, memberdayakan dan mendampingi masyarakat di lokasi wisata, dan memberikan layanan yang terbaik bagi Sedangkan masyarakat wisatawan. bertangungjawab untuk menjaga lingkungan kawasan wisata agar tetap asri, asli, dan bersih, menyediakan dan memberikan layanan yang terbaik bagi pengunjung. Akhirnya, kerjasama yang sinergis ini akan menghasilkan akselerasi jika dipublikasikan melalui media internet yang dilakukan oleh para pengunjung. Secara skematis, model kerjasama antara Pemerintah (G), Swasta (B), Perguruan Tinggi (U), Masyarakat (C), dan Media ini dapat dilihat pada Gambar 8:



Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2019

Kerjasama yang sinergis ini pada akhirnya akan berdampak pada semakin berkembangnya kawasan ekowisata. Dalam hal ini Pemerintah Daerah bertindak sebagai koordinator yang memberikan arah dan tujuan bagi pengembangan kawasan ekowisata melalui regulasi dan program-program pengembangan. Disisi lain. Pemerintah Daerah juga bertanggungjawab untuk mengeluarkan perizinan bagi swasta dan kelompok masyarakat ang akan terlibat dalam program pengembangan ini. Sementara itu, Perguruan Tinggi dan Swasta dapat berperan aktif terutama dalam programpemberdayaan program masyarakat. Masyarakat pada akhirnya adalah komunitas yang siap untuk memberdayakan dirinya dan untuk diberdayakan oleh pihak-pihak dari eksternal Desa.

Model Penta Helix menjadikan Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi, Masyarakat, dan Media sebagai pilar. Kelima pilar ini memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kawasan ekowisata melalui pengembangan produk wisata yang terdiri atas Atraksi, akses, aktivitas, layanan, kualitas sumberdaya manusia, dan promosi. Satu hal yang menjadi masalah dalam pengembangan kawasan wisata berbasis pantai di Kecamatan Kelumbayan adalah tidak adanya produk yang spesifik dari setiap setiap Desa. Mengacu pada hasil penelitian Muftiadi (2017: 124) tentang pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Pangandaran. maka perlu dimunculkan kekhasan masing-masing objek wisata sehingga ada varian atraksi dan aktivitas di setiap objek. Hal ini sejalan dengan program Bupati Tanggamus yaitu Sai Pekon Sai Produk (Satu Desa Satu Produk). Selain itu, perlu diperhatikan juga peran Desa penyangga kawasan ekowisata sebagai penyedia logistik bagi objek wisata. Artinya, pengembangan kawasan ekowisata harus dilakukan secara terintegrasi diantara objek-objek wisata.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kelumbayan memiliki 7 (tujuh) objek wisata pantai yang potensial untuk dikembangkan, yaitu Teluk Kiluan, Pantai Gigi Hiu, Laguna Gayau, Pantai Napal, Pantai Harapan, Pantai Batu Suluh, dan Pantai Teluk Paku. Namun pengembangan objek wisata ini belum berjalan optimal karena masih terdapat beberapa hambatan utama dalam kelembagaan industri pariwisata yang diantaranya adalah (1) belum adanya aturan dan regulasi tentang pengelolaan kawasan ekowisata, (2) kebijakan Pemda yang terlalu memprioritaskan kawasan ekowisata Teluk Kiluan dan meninggalkan kawasan ekowisata yang lain, (3) tidak adanya sistem biaya yang seragam terkait dengan tiket masuk, dan bagi hasil antara Desa dengan pengelola kawasan ekowisata, serta (4) sikap dan perilaku sebagian kecil anggota masyarakat yang oportunis dengan memanfaatkan kehadiran pengunjung di lokasi wisata sebagai objek pemerasan dengan alasan biaya parkir, biaya keamanan, dan biaya-biaya lainnya. Selain itu, Pola kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Daerah, Swasta, akademisi, Masyarakat, dan Media dalam kerangka Pentahelix juga belum berjalan secara optimal. Masing-masing pihak masih bekerja secara parsial dan belum berkoordinasi dalam mengembangkan kawasan ekowisata berbasis pantai di Kecamatan Kelumbayan.

DAFTAR PUSTAKA

Borner, Silvio, Aymo Brunetti, & Beatrice Weder. 1992. *Institutional Obstacles to Latin American Growth*. San Francisco: An International Center for Economic Growth Publication ICS Press

BPS Kabupaten Tanggamus. 2019. *Kabupaten Tanggamus Dalam Angka Tahun 2019*

Brunetti, Aymo, Gregory Kisunko and Beatrice Weder.1997. Institutional Obstacles for Doing Business Data Description and Methodology of a Worldwide Private Sector Survey. Work Bank. http://siteresources.worldbank.org/

INTWBIGOVANTCOR/Resources/ wps1759.pdf. diakses tanggal 2 Desember 2013

Chang, Sea- Jin & Brian Wu. 2013. *Institutional Barriers and Industry Dynamics*. http://ssrn.com/abstract=1350531. Page 1-54 diakses tanggal 12 Septem 2013

- Devy, Helln Angga & R.B. Soemanto.

 Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik
 Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan
 Wisata Di Kabupaten Karanganyar. Jurnal
 Sosiologi DILEMA, Vol. 32, No. 1 Tahun
 2017 ISSN: 0215/9635 Published by Lab
 Sosio, Sosiologi, FISIP, UNS
- Fogel, Kathy, Ashton Hawk, Randall Morck, & Bernard Yeung. 2006. Institutional Obstacles to Entrepreneurship. in "Oxford Handbook of Entrepreneurship, Mark Casson, Bernard Yeung, Anuradha Basu, and Nigel Wadeson, (eds.) England: Oxford University Press
- Geroski PA. 1995. What Do We Know About Entry? International Journal of Industrial Organization. Volume 13 Number 4: 421-440
- Luo, Yadong & Marc Junkunc. 2008. How Private **Enterprises** Respond Government Bureaucracy in Emerging Economies: The Effects of Entrepreneurial and Government. Strategic Entrepreneurship Journal 2: 133 - 153 (2008). Published online in Wiley InterScience www.interscience.wiley.com) 10.1002/sej.46. DOI http://www.management.pamplin.vt.edu/di rectory/Articles/Junkunc2.pdf. diakses tanggal 20 Maret 2013
- Muftiadi, Anang. 2017. Developing Tourism Village And Its Potential In Pangandaran District. Jurnal AdBispreneur Vol. 2, No. 2, Agustus 2017 Hal. 117-124
- North, Douglas C. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press
- Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, No.1. pp. 97-112. published by American Economic Association
- - <u>Current% 20topics% 20in% 20Turkish% 20</u> Economy/north.pdf. diakses 8 Juli 2012)

- Ollila, Petri. 2009. *Principles of Institutional Economics*, Helsinki: University of Helsinki
- Rodríguez. 2007. A Model of Strategic Evaluation of a Tourism Destination Based on Internal and Relational Capabilities.

 Journal of Travel Research. 46(4):368-380 April 2007

 DOI: 10.1177/0047287507308324. https://www.researchgate.net/publication/2 49701257 A Model of Strategic Evaluat ion of a Tourism Destination Based on Internal and Relational Capabilities.

 Diakses tanggal 5 Maret 2020
- Stange, Jennifer, David Brown, and Solimar International. 2011. *Tourism Destination Management : Achieving Sustainable And Competitive Results*. Washington, DC: International Institute for Tourism Studies The George Washington University
- Štumpf, Petr. 2014. Strategic Vision of Sustainable Tourism Development: Municipality of Strážný 2020. The International Scientific Conference INPROFORUM 2014 November 6 7, 2014, České Budějovice, 218-224, online ISSN 2336-6788, ISBN 978-80-7394-484-1.
 - https://www.researchgate.net/publication/3
 19165882_Strategic_Vision_of_Sustainabl
 e_Tourism_Development_Municipality_of
 Strazny_2020/link/5996c95f0f7e9b91cb1
 39992
- Sukardjo, Sukristijono. 1985. *Laguna Dan Vegetasi Mangrove*. Oseana, Volume X, Nomor 4. page 128-137 ISSN 0216-1877
- Tapatfeto, Meiwany A. K, Juita L.D Bessie, dan Abas Kasim. 2018. Strategi Pengembangan Objek Wisata Dalam Upaya Peningkatan Kunjungan (Studi Pada Objek Wisata Pantai Oetune Kabupaten Tts) Journal Of Management (SME's) Vol. 6, No.1, 2018, p1-20
- Tybout JR. 2000. Manufacturing Firms in Developing Countries: How Well Do They Do, And Why? Journal of Economic Literature 38(1): 11-44.
- UNESCO.tt.Sustainable Tourism Development in UNESCO: Designated Sites in South-Eastern Europe.

http://portal.unesco.org/es/files/45338/124 17872579Introduction_Sustainable_Touris m.pdf/Introduction_Sustainable_Tourism. pdf

Verriest, Arnt , Laurens Cherchye, Ann Gaeremynck.2008. *Institutional Characteristics and Firm Profitability*. Katholieke Universiteit Leuven July 2008. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1013143 diakses tanggal 2 Desember 2012

World Tourism Organization. 1995. *UNWTO* technical manual: Collection of Tourism Expenditure Statistics p. 10.

Dokumen:

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 - 2031